

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini, dan memperjelas arah penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul.

Judul skripsi ini adalah **"POLA KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN KOTA SALATIGA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004"**.

Ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan dari judul tersebut di atas, yaitu :

### 1. Pola

Pola seperti disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem atau cara kerja.<sup>1</sup> Kata 'Pola' juga bisa berarti model, contoh, pedoman (rancangan) dasar kerja.<sup>2</sup>

Jadi pola yang dimaksud di sini adalah model atau contoh sistem dan cara kerja Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga dalam melakukan komunikasi politik untuk mencapai target politik pada pemilu 2004.

### 2. Komunikasi Politik

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan istilah komunikasi politik dalam skripsi ini perlu penulis jelaskan tiga istilah, yaitu komunikasi; politik itu ; dan komunikasi politik.

#### a. Komunikasi

---

<sup>1</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976) hal. 692

<sup>2</sup> Pius Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Penerbit Arkola, 1994) hal, 605

Menurut Dan Nimmo komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra melalui simbol-simbol.<sup>3</sup>

Komunikasi juga dimaknai sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), atau perilaku (*behaviour*) baik secara langsung maupun tak langsung melalui media.<sup>4</sup>

b. Politik dan Komunikasi Politik

Terdapat berbagai macam definisi tentang politik. Seperti yang dikutip Dan Nimmo dari beberapa pakar dalam bukunya "*Political Communication and Public Opinion in America*" politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana (Lasswell); pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang (Easton); kekuasaan dan pemegang kekuasaan (Catlin); tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya (Weinstein). Sedangkan Dan Nimmo mendefinisikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media* (terjemah dari *Political Communication and Public Opinion in America*), penerjemah : Tjun Surjaman , (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 2000), hal 6.

<sup>4</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, cet. II, 1992), hal 5.

<sup>5</sup> Dan Nimmo, *op. cit*, hal. 8.

Sementara Meriam Budiarjo mendefinisikan politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem tersebut.<sup>6</sup>

Politik, seperti komunikasi, adalah proses yang melibatkan pembicaraan, akan tetapi bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol – kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan, dan dipertukarkan melalui komunikasi. Oleh sebab itu banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Dengan kata lain komunikasi politik adalah (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.<sup>7</sup>

### 3. Pemilu Legislatif 2004

Yang dimaksud dengan Pemilu Legislatif 2004 di skripsi ini adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dihelat pada tanggal 5 April 2004.

---

<sup>6</sup> Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, cet VII, 1982), hal. 8.

<sup>7</sup> Dan Nimmo, *op. cit*, hal. 9

Dari definisi di atas, yang maksud dari judul **“Pola Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga pada Pemilu Legislatif 2004”** adalah upaya untuk melakukan analisis dan pemaparan terhadap bentuk dan sistem kerja Partai Keadilan Sejahtera kota Salatiga dalam melakukan (kegiatan) komunikasi – yang dianggap komunikasi politik – untuk mencapai target perjuangan politiknya pada pemilu legislatif 2004.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Era Reformasi, yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan yang dipegangnya selama tiga dasawarsa lebih, ternyata telah membawa berbagai implikasi. Peristiwa itu menandai munculnya berbagai perubahan penting di bumi Indonesia. Kotak Pandora atmosfer kehidupan politik Indonesia telah terbuka. Untuk waktu yang panjang, dunia politik Indonesia merupakan lapangan yang sakral bagi masyarakat umum untuk secara sadar berpartisipasi. Dunia politik merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal itu menyebabkan masyarakat tidak saja merasa terambangkan secara politik, dalam pengertian mereka tidak dapat mengembangkan imajinasi politik mereka sendiri yang berbeda dengan politik negara, akan tetapi mereka juga dihadapkan pada kenyataan bahwa wilayah politik benar-benar merupakan sesuatu yang harus dihindari.

Tumbangny pemerintah Orde Baru ternyata telah membawa fenomena euphoria. Pintu liberalisasi dan relaksasi politik dinilai telah terbuka lebar dan publik politik Indonesia merasa terbebaskan dari belenggu kultural

dan struktural yang selama ini menyulitkan dan membatasi kehidupan mereka, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional serta dalam melakukan kontrol sosial-politik terhadap proses penyelenggaraan negara. Perasaan terbebaskan inilah yang membentuk dan mempengaruhi kehidupan politik kita dewasa ini, yang sampai tingkat-tingkat tertentu sudah sangat berbeda dengan apa yang pernah berkembang di masa sebelumnya. Walaupun belum bisa dikatakan demokratis, benih-benih kehidupan politik yang kompetitif telah mulai berkembang. Dalam konteks ini, yang sangat menonjol adalah demikian terbukanya kehidupan pers, dihormatinya hak untuk mengekspresikan pendapat dan maraknya kehidupan partai politik.

Dari kondisi inilah banyak partai bermunculan, yang jumlahnya tak pernah terbayangkan dalam sejarah Indonesia modern. Seperti dilaporkan, antara Mei sampai Oktober 1998, di tengah situasi yang serba tak menentu, yang ditandai antara lain oleh krisis ekonomi, politik, dan munculnya kekerasan di sana sini, khususnya di kota besar, kita menyaksikan lahirnya 181 partai politik. Dari jumlah itu, 42 partai dapat dikategorikan sebagai partai Islam. Sebagian besar dari mereka menggunakan asas dan simbol Islam. Setidak-tidaknya mereka “menggunakan” massa Islam sebagai basis pendukungnya.<sup>8</sup> Sedangkan untuk pemilu 2004 terhitung ada 24 partai sebagai peserta pemilu dan yang berbasis Islam ada sekitar 7 partai yaitu ; PPP, PKB, PAN, PBB, PKS, PNUI, PBR.

---

<sup>8</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), hal. 56-57.

Begitu banyaknya partai Islam atau partai yang berbasis massa Islam yang muncul bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tanpa adanya benang merah dan akar sejarah yang melatar belakangnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga pada saat negara ini akan terbentuk sebagian tokoh Islam seperti Mohammad Natsir, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Sukiman, dan sebagainya yang mewakili kelompok agama menginginkan Islam dijadikan sebagai dasar negara. Selain alasan tersebut, keyakinan mereka bahwa Islam adalah agama yang memberi petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan juga merupakan dasar mereka untuk menjadikan Islam sebagai landasan ideologi dan konstitusional negara.<sup>9</sup>

Keinginan tersebut mereka perjuangkan melalui aktifitas politik yaitu dengan mendirikan partai politik, sebut saja Masyumi, NU, PSII, Parmusi, Perti, dll. Pada saat yang sama keinginan tersebut mendapat tentangan dari kelompok nasionalis yang menginginkan Indonesia tidak didasarkan atas paham keagamaan tertentu melainkan didasarkan atas paham yang kurang lebih dapat diterima oleh semua golongan, dalam hal ini yang diusulkan adalah Pancasila. Kelompok ini diwakili oleh Soekarno, Mohammad Yamin, Supomo dan Mohammad Hatta, sehingga dalam kerangka supra struktur politik Indonesia pada masa itu panggung perbedaan mengambil tempat pada pengaturan ideologis dan konstitusional negara yang tercermin dari

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 68



munculnya polarisasi ideologis dua kelompok besar – “golongan nasionalis” dan “golongan agama”.<sup>10</sup>

Hingga kini, perdebatan di seputar ini pada dasarnya masih belum terselesaikan secara baik. Pernah suatu jalan tengah dihasilkan, yaitu dengan diterimanya Piagam Jakarta pada Juni 1945. Jalan Tengah itu mengakomodasikan kepentingan *golongan Islam*, dengan diterimanya prinsip “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Akan tetapi, belum sempat terealisasi di dalam kenyataan, jalan tengah itu terpaksa dianulir sehari setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, yakni pada 18 Agustus 1945. Sebagai ganti dari Piagam Jakarta adalah disahkannya rumusan sila pertama dari Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>11</sup>

Ternyata, kesepakatan 18 Agustus 1945 itu tidak lantas menjadikan perdebatan di seputar masalah agama dan ideologi politik kenegaraan berhenti. Di sepanjang tahun 1956-1959, sejarah Indonesia didominasi oleh masalah-masalah yang pada bulan-bulan menjelang kemerdekaan kemerdekaan (1945) pernah diperdebatkan. Sidang Konstituante kembali membuka perdebatan tentang dasar Negara. Dan pada kesempatan ini pula Islam dihadapkan secara diametral dengan Pancasila untuk ditetapkan sebagai dasar negara. Absolutisme mewarnai perdebatan, untuk kemudian diakhiri dengan *deadlock*. Dilihat dari perspektif pertengahan tahun 1940-an, perdebatan antara *golongan agama* dan *golongan nasionalis* gagal

---

<sup>10</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1996,) hal 60

<sup>11</sup> Endang Saefudin Anshari, *Piagam Jakarta*, ( Bandung: Pustaka, 1980), hal. 25.

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan di dalam soal yang satu ini – dasar negara ! Negara tidak memiliki kemewahan untuk berlarut-larut di dalam perdebatan. Atas dasar itu, setidaknya-tidaknya demikianlah *reason d'etre* yang dikemukakan Soekarno, Presiden – dengan dukungan tentara – mengeluarkan dekrit kembali kepada UUD 1945.<sup>12</sup>

Persoalan di atas bagi golongan agama sebagai pihak yang “kalah” meninggalkan konsekuensi dan menuai akibat-akibat secara agak dramatis. Sejak dasawarsa 1960-an, kelompok inilah yang diasosiasikan dengan cap-cap seperti *outsider*, *ekstrim kanan* dan ancaman terhadap konstruk negara-bangsa Indonesia. Ujung dari semua adalah bahwa politik Islam menjadi objek untuk dimarginalisasikan. Kondisi ini diteruskan oleh pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan deideologisasi dan depolitisasi yang sangat kuat sehingga kehidupan politik sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan. Penolakan terhadap organisasi dan partai ‘berlabel’ Islam dengan dalih untuk menata kembali sistem kepartaian dan sistem politik warisan Orde Lama serta agar masa depan politik Orde Baru tidak ditandai oleh konflik-konflik ideologis.<sup>13</sup>

Usaha pemerintah guna menjalankan restrukturisasi politik yaitu dengan usaha penyederhanaan partai politik dari sembilan menjadi tiga : Golkar; PPP sebagai peleburan dari NU, Parmusi, PSII dan Perti; dan PDI sebagai peleburan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. Puncak restrukturisasi yang juga sering diartikan sebagai proses “*depolitisasi*”

---

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995), hal. 69

<sup>13</sup> Ridwan Saidi, *Kepemimpinan Islam Indonesia Kini dan Esok*, (Jakarta : Antarkota, 1986), hal. 82



Islam, terlihat pada usaha pemerintah untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan sosial dan politik. Penerapan “asas tunggal” tersebut bukan saja berlaku bagi partai-partai politik, melainkan juga berlaku bagi semua organisasi apa pun, sesuai dengan nafas ketetapan Undang-undang No. 8/1985. Diterimanya asas tunggal oleh partai Islam (PPP) khususnya dan ormas-ormas keislaman umumnya, adalah indikasi “lenyapnya partai Islam di Indonesia”.<sup>14</sup>

Gagasan lain yang dikembangkan Orde Baru adalah diberlakukannya konsep *floating mass* yaitu konsep massa mengambang yang memutuskan basis dan jalur kegiatan partai politik atau Golkar dengan massa rakyat, kecuali menjelang Pemilu, meskipun Golkar tetap saja punya akses yang kuat lewat jalur birokrasi yang mendukungnya dari tingkat pusat hingga desa bahkan RT. Kepada rakyat selalu ditanamkan bahwa politik itu kotor dan politik adalah urusan para elite dan orang besar saja.

Tidak berhenti di situ, restrukturisasi politik Orde Baru ini juga menjangkau jauh ke dalam kampus, tempat dimana benih-benih aktivisme dan intelektualisme tumbuh subur. Semenjak peristiwa Malari (malapetaka lima belas januari) 1974, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan depolitisasi lewat metode-metode koorporasi terhadap organisasi kemahasiswaan dan birokratisasi kampus. Untuk organisasi intra di kampus, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Sjarif Thayeb, menerapkan SK 028/1974 tentang NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi

---

<sup>14</sup> Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hal. 33-34.

Kemahasiswaan), yang mempersempit ruang gerak mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap aktivitas mahasiswa harus mendapat persetujuan pimpinan perguruan tinggi, dan pimpinan perguruan tinggi menjadi penanggung jawab penuh atas segala yang terjadi di dalam kampusnya.<sup>15</sup>

Demokrasi sering disebut sebagai ‘pemerintahan oleh opini publik’,<sup>16</sup> sehingga partai atau politikus yang mampu menarik simpati rakyat, mampu mendapatkan kepercayaan rakyat dan menguasai opini publik dia akan tampil sebagai pemenang.

Sistem Pemilu 2004 adalah tonggak baru yang mencoba memberikan kedaulatan di tangan rakyat (walaupun belum sepenuhnya dan terkesan setengah-setengah), karena pada pemilu 2004 ini rakyat diberikan kebebasan untuk memilih wakil mereka secara langsung, juga pasangan capres dan cawapres secara langsung.

Pada pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 5 April 2004 ada fenomena menarik yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai Islam yang lolos ET (*Electoral Treshold*). Yang menarik adalah Partai ini tidak memiliki basis massa cultural seperti halnya PKB dengan massa NU-nya, PAN dengan massa Muhammadiyah. Partai ini lima tahun lalu adalah partai gurem yang suaranya tidak mencapai 2 % (hanya 1,36 %) dan hanya

---

<sup>15</sup> Dede Suryadi, *Proses Lahir dan Kontroversi NKK/BKK 1978 – 1980*, (Sekripsi Sarjana FS-UI, 1999), hal 10

<sup>16</sup> Dan Nimmo, *op. cit* hal 9.

mendudukan 7 orang wakilnya di DPR RI,<sup>17</sup> sehingga harus mengganti namanya pada pemilu 2004. Sekarang pada pemilu 2004 dia masuk lima besar mengungguli PAN yang memiliki basis massa cultural, dan yang paling spektakuler partai ini berhasil menjadi pemenang di wilayah DKI.

Fenomena tersebut juga terjadi di Salatiga di mana partai tersebut pada pemilu 1999 hanya memperoleh satu kursi di DPRD kota, sekarang pada pemilu 2004 PKS mampu mencatat prestasi gemilang dengan mendapatkan 4 kursi. Mereka adalah Budi Santoso, SE (dari DP 1 Argomulyo), Asadullah M, S.Pd (dari DP 2 Tingkir), M. Fatkhurrahman, SE (dari DP3 Sidomukti), dan Ahmad Syuhada, SE, MM (dari DP 4 Sidorejo)

Prestasi inilah yang menarik untuk diteliti, untuk mengetahui sejauh mana peran komunikator politik di internal partai mereka dalam mendulang suara di wilayah yang semua orang maklum bahwa Salatiga bukanlah basis PKS.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana pola komunikasi politik yang dibangun PKS Kota Salatiga untuk mencapai target perjuangannya pada pemilu legislatif 2004 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara historis dalam setiap pelaksanaan pemilu raya di republik ini, belum pernah menempatkan partai Islam sebagai pemenang, padahal mayoritas kontituen adalah orang yang beragama (Islam). Terlepas dari

---

<sup>17</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan (Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indoneia)*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002) hal.1

motivasi dan dasar politik partai-partai Islam tersebut, menjadi sangat menarik untuk mengetahui sejauh mana SDM dan kemampuan manajemen politik yang dimiliki oleh partai ‘agama’ (bc: Islam) dan dalam hal ini diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola atau model komunikasi politik yang dibangun PKS kota Salatiga, dalam mencapai tujuan politik mereka pada pemilu legislatif 2004.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Menurut Jalaluddin Rahmat, di Indonesia komunikasi politik sebagai disiplin ilmu, telah lama tercantum dalam kurikulum-kurikulum ilmu sosial – baik dalam kajian ilmu komunikasi ataupun dalam kajian ilmu politik. Akan tetapi karena berbagai hal, baik komunikatif maupun politis, literatur komunikasi politik di Indonesia tidak cukup tersedia dan relatif masih sedikit.<sup>18</sup> Sehingga menjadi harapan penulis agar penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi pengembangan dan memperkaya khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu komunikasi politik dan ilmu komunikasi pada umumnya.
2. Dengan penelitian ini penulis berharap akan menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga dan partai-partai Islam lainnya serta bagi masyarakat pada umumnya.

#### **F. Kerangka Pemikiran Teoritik**

1. Tinjauan Umum tentang Model Komunikasi
  - a. Pengertian Model Komunikasi

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Politik untuk Indonesia: Sebuah Peta Penelitian*, Makalah disampaikan pada “Seminar Nasional Komunikasi Menghadapi Tinggal-Landas”, ISKI, Semarang 21-25 Oktober 1985.

Untuk memahami fenomena komunikasi, bisa digunakan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. **Deddy Mulyana** menjelaskan tentang pengertian model komunikasi dengan mengutip beberapa pendapat, sebagai berikut;

1. **Sereno dan Mortensen**, berpendapat suatu model komunikasi merupakan diskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model mempresentasikan secara abstrak cirri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam “dunia nyata”.
2. **B. Aubrey Fisher** mengatakan, model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori.
3. **Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr.** menjelaskan, model membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan.<sup>19</sup>

b. Fungsi dan Manfaat Model

**Gordon Wiseman dan Larry Barker**, mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai tiga fungsi: *pertama*, melukiskan

---

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar)*, 9Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 121

proses komunikasi; *kedua*, menunjukkan hubungan visual; *ketiga*, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Sedangkan **Deutsch** menyebutkan bahwa model itu mempunyai empat fungsi: *mengorganisasikan* (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak teramati; *heuristik* (menunjukkan fakta-fakta dan metoda baru yang tidak diketahui); *prediktif*, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak; *pengukuran*, mengukur fenomena yang diprediksi.<sup>20</sup>

Adapun manfaat pembuatan model menurut **Irwin D.J. Bross**, antara lain;<sup>21</sup>

1. Model menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah, bila model awal tidak berhasil memprediksi.
2. Model mungkin menyarankan kesenjangan informasional yang tidak segera tampak dan konsekuensinya dapat menyarankan tindakan yang berhasil. Ketika suatu model diuji, karakter kegagalan kadang-kadang memberikan petunjuk mengenai kekurangan model tersebut.

Menggunakan pendapat **Raymond S. Ross**, model memberi kita penglihatan yang lain, berbeda, dan lebih dekat; model menyediakan kerangka rujukan, menyarankan kesenjangan informasional, menyoroti problem abstraksi, dan menyatakan suatu problem dalam bahasa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 124



simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol.<sup>22</sup>

### c. Model Komunikasi Lasswell

Sebenarnya komunikasi sulit dimodelkan, karena bersifat dinamis. Akan tetapi penggunaan model berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan hubungannya. Sejauh ini terdapat ratusan model komunikasi yang telah dibuat oleh pakar. Kekhasan suatu model komunikasi dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan (pembuat) model tersebut, paradigma, kondisi teknologis, dan semangat zaman yang melingkunginya.

Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni *Who, Says What, In which Channel, To Whom, What Effect?* Harold Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi: pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespons lingkungan, dan transmisi warisan social dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model Lasswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model Lasswell dikritik karena model ini tampaknya mengisyaratkan kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan dan dianggap terlalu menyederhanakan masalah.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Komunikasi Politik

### a. Pengertian Komunikasi Politik

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 125

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 132 - 162

Seperti yang penulis sebutkan di atas bahwa **Dan Nimmo** mendefinisikan komunikasi politik sebagai “*communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under the condition of conflict*” [(kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik].<sup>24</sup>

Sedangkan **Zulkarimein Nasution** memaparkan tentang pengertian komunikasi politik dengan mengutip dari beberapa pendapat ahli; **Fagen (1966)** mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dan lingkungannya; **Muller (1973)** merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (*political outcomes*) dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi; **Galnoor (1980)**, mendefinikan komunikasi politik sebagai infrastuktur politik, yaitu suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial, dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran, **Almond** dan **Powell** mengartikan komunikasi politik sebagai suatu fungsi sistem yang mendasarkan (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Dan Nimmo, *op.cit*, hal. 9

<sup>25</sup> Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 24

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi, dan komunikasi politik sebagai fungsi politik, sama dengan fungsi lainnya yaitu, artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik.

b. Lingkup Studi Komunikasi Politik

Seperti yang disampaikan **Jalaluddin Rakhmat**, bahwa komunikasi politik melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara multidisipliner, dan setiap ilmu menyumbangkan fokus telaah yang kemudian menjadi pokok bahasan dalam komunikasi politik. Sumbangan berbagai disiplin ilmu ini mempunyai akibat ganda. Pada satu sisi, ia memperkaya bidang kajian, dan pada sisi lain mengaburkan batas-batas disiplin komunikasi politik. Oleh karena itu untuk memasukkan lingkup studi komunikasi politik dalam sebuah sistem dan setting politik, perlu merumuskan kerangka kajian yang bisa dijadikan patokan dan batasan.

Beberapa pakar menjelaskan tentang lingkup studi komunikasi politik, antara lain:

1. **Dan Nimmo (1981)** menyebutkan cakupan komunikasi politik meliputi komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat politik.
2. **Kraus dan Davis (1976)** membaginya menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi massa dan proses pemilu, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, konstruksi realitas politik di masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Jalaluddin Rakhmat, *op. cit*, hal. 2

3. **Fagen (1966)** lingkup studi komunikasi politik yaitu setiap aktivitas komunikasi yang memuat pertimbangan bersifat politis dalam arti implikasinya bagi sistem politik.
4. **Almond dan Powell (1966)** merumuskan lingkup studi komunikasi politik pada:
  - Arus informasi yang paling umum dan signifikan dalam sistem politik.
  - Struktur-struktur yang menampilkan aktivitas-aktivitas komunikasi politik dan dapat diperbandingkan serta dianalisis.
  - Implikasi penampilan fungsi komunikasi terhadap fungsi-fungsi politik.
  - Analisis terhadap penyampaian fungsi komunikasi oleh berbagai struktur dan dengan berbagai macam cara. Juga dapat mengemukakan masalah endemik yang dihadapi oleh bermacam-macam sistem dalam memelihara dan mempertahankan tingkat penampilan yang bersifat publik.<sup>27</sup>

Dari beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa cakupan komunikasi politik cukup luas, dan belum ada kesepakatan tentang apa saja yang termasuk komunikasi politik, sehingga di sini penulis dalam penelitiannya akan menggunakan konsep **Dan Nimmo**, yaitu meliputi komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat politik.

c. Unsur-Unsur Komunikasi Politik

1. Komunikator Politik

Menurut Halloran, komunikator adalah sebagai orang yang menduduki posisi penting yang peka di dalam jaringan sosial, menanggapi berbagai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya terjadi di dalam sistem sosial yang bersangkutan. Apa yang dikatakan Halloran tentang komunikator

---

<sup>27</sup> Zulkarimein Nasution, *op. cit*, hal. 26-27

massa, berlaku juga bagi komunikator politik, karena dia memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik.<sup>28</sup>

Komunikator dalam komunikasi politik adalah pihak yang memprakarsai atau sebagai sumber penyampaian kepada pihak lain. Komunikator dalam komunikasi politik sama seperti komunikator dalam peristiwa komunikasi lainnya. Komunikator politik dapat berwujud sebagai individu (*individual source*) atau berupa kelompok, orang banyak atau kolektif, tetapi di sisi lain, sebenarnya seorang komunikator individual dapat dipandang sebagai sumber kolektif (*colective source*), apabila yang bersangkutan mempunyai status atau kedudukan dalam kelompok tersebut. Komunikator memiliki kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi.

Untuk dapat mengetahui komunikator politik dalam sebuah setting politik, terlebih dahulu komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. **Dan Nimmo** mengidentifikasikan komunikator dalam tiga kategori; *politikus* yang bertindak sebagai komunikator politik,

---

<sup>28</sup> Dan Nimmo, *op. cit.*, hal. 29

komunikator *profesional* dalam politik, dan *aktivis* atau komunikator paruh waktu (*part-time*).<sup>29</sup>

a. Politikus sebagai komunikator politik

Dalam konteks Amerika Dan Nimmo mengidentifikasi politikus sebagai orang yang harus dan memang berkomunikasi politik untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Sedangkan Daniel Katz mengklasifikasikan politikus menjadi dua kelompok; politikus yang bertindak sebagai *ideolog* dan politikus partisan (bila dipandang sebagai komunikator politik, perbedaan tersebut hanya dalam derajatnya, bukan jenisnya). Politikus partisan adalah politikus yang berkomunikasi mewakili kepentingan kelompok, sedangkan ideolog tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan kelompok, ia lebih terfokus pada kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan perubahan revolusioner.<sup>30</sup>

b. Profesional sebagai komunikator politik

Komunikator profesional adalah seorang yang mengendalikan ketrampilan yang khas dalam mengolah simbol-simbol dan memanfaatkan ketrampilan ini untuk menempa mata rantai yang menghubungkan orang-orang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 31-32



jasas perbedaannya atau kelompok-kelompok yang dibedakan. Menurut James Carey, komunikator profesional adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa lainnya yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti, komunikator profesional menghubungkan elit dalam organisasi atau komunitas manapun dengan khalayak umum.<sup>31</sup> Satu perangkat profesional mencakup para jurnalis dan meliputi para promotor<sup>(32)</sup>.

c. Aktivist sebagai komunikator politik

Aktivist sebagai komunikator politik merupakan jaringan komunikasi politikus yang menjadi saluran-saluran organisasional dan interpersonal yang menyampaikan sebagian besar informasi tentang politik yang diterima oleh warga negara biasa. Dan Nimmo membaginya dalam dua tipe:<sup>33</sup> pertama, “Jurubicara” bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah. Jurubicara

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>32</sup> Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan kelompok tertentu. Yang masuk dalam promotor adalah agen publisitas tokoh masyarakat yang penting, personel Humasy pada organisasi swasta atau pemerintah, pejabat informasi publik pada jawatan pemerintah, sekretaris pers kepresidenan, personel periklanan perusahaan, manager kampanye dan pengarah publisitas kandidat politik, spesialis teknis (kameraman, produser dan sutradara film, pelatih pidato, dsb) yang bekerja untuk kepentingan kandidat politik dan tokoh masyarakat lainnya, dan semua jenis makelar simbol lainnya. (lihat Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America*)

<sup>33</sup> Dan Nimmo, *Ibid*, hal 37.

ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi, namun ia cukup terlibat baik dalam politik maupun dalam komunikasi, sehingga dapat disebut semiprofesional. *Kedua*, **“pemuka pendapat”** yaitu orang yang dimintai petunjuk oleh orang-orang yang menghormati mereka tentang keputusan yang bersifat politis, seperti tokoh masyarakat, ulama/pemuka agama, ketua adat, dll.

## 2. Pesan Politik

Komunikasi dibangun adalah untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka. Seseorang menciptakan sejumlah besar citra (pemahaman subjektif atau interpretasi) tentang beragam objek yang relevan dengan politik. Rangsangan yang membantu pencitraan adalah pesan, yakni “mengatakan apa” dari rumus Lasswell. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kenneth Boulding yang dikutip Nimmo bahwa makna pesan adalah perubahan yang dihasilkannya di dalam citra. Pesan politik biasanya disampaikan melalui simbol, bahasa, dan opini publik.<sup>34</sup>

## 3. Media atau Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan (*message*) kepada penerima (*receiver*).<sup>35</sup> Saluran ini dapat dianggap sebagai

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>35</sup> Evert M. Rogers, *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Edwart Depari dan Calvin MacAndrews (ed.), (Yogyakarta: Gajahmada University Press, cet VII, 1998), hal. 17

penerus (penyampai) pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi.

Saluran komunikasi politik dapat juga diartikan sebagai alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Dan Nimmo membagi saluran dalam tiga tipe saluran komunikasi, yaitu:<sup>36</sup>

- (i) *Komunikasi massa*, yakni menekankan komunikasi satu-kepada-banyak.
- (ii) *Komunikasi interpersonal*, yang merupakan bentukan dari hubungan satu-kepada-satu.
- (iii) *Komunikasi organisasi*, yakni menggabungkan penyampaian satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak.

Sedangkan Almond dan Powell (1966) seperti dikutip Zulkarimein Nasution membagi saluran komunikasi politik pada:

- (i) Struktur wawanmuka (*face-to-face*) informal
- (ii) Struktur sosial tradisional
- (iii) Struktur masukan (*input*) politik
- (iv) Struktur keluaran (*output*) politik
- (v) Media massa.<sup>37</sup>

#### 4. Teknik Komunikasi Politik

##### a. Persuasi Politik

Persuasi adalah perubahan sikap mental dan perilaku orang melalui kata-kata terucap atau tertulis, menanamkan

<sup>36</sup> Dan Nimmo, *op. cit.*, hal. 169

<sup>37</sup> Zulkarimein Nasution, *op. cit.* hal 57

opini baru dan suatu usaha sadar untuk mengubah sikap mental, keyakinan atau perilaku orang melalui transmisi sejumlah pesan.<sup>38</sup> Persuasi biasanya mengandung unsur tujuan, yaitu suatu usaha komunikator untuk mencapai tujuan melalui pembicaraan. Maka pada sisi lain persuasi sering disebut komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan.

Persuasi dapat dilakukan dengan cara disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya ada partai politik yang menyampaikan program-program politiknya (disengaja) dan seorang secara spontan memuji program-program tersebut (tidak disengaja). Maka, persuasi sebenarnya sebagai proses timbal balik yang di dalamnya komunikator dengan sengaja atau tidak menyimpulkan perasaan responsif pada orang lain.

Sifat dan proses persuasi antara lain, biasanya persuasi menyangkut maksud atau upaya dari pihak komunikator untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembicaraan dan persuasi bersifat dialektikal. Dengan kata lain persuasi merupakan proses resiprokal (timbal-balik) di mana komunikator berusaha dengan sadar maupun tidak untuk membangkitkan suatu tali penghubung (*chord*) yang responsif di pihak lain.

#### b. Propaganda Politik

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 119

Menurut pendapat Ellul seperti dikutip Dan Nimmo propaganda sebagai alat yang dipergunakan oleh sekelompok yang terorganisir untuk menjangkau nilai-nilai individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam suatu organisasi.<sup>39</sup> Sedangkankan rumusan Oxford Dictionary seperti dikutip Zulkarimein Nasution, propaganda adalah suatu perhimpunan atau program untuk menyebarkan suatu doktrin atau cara.<sup>40</sup>

Ada beberapa teknik propaganda yang sering dipergunakan dalam komunikasi politik, antara lain; melalui penggunaan stereotif, penggantian nama, seleksi, sungguh-sungguh berbohong, pengulangan, *assertion*, dan *the appeal to out hority*. Sedangkan Dorothy Mulgrave seperti dikutip A.H. Hasanuddin membagi 7 macam teknik propaganda:<sup>41</sup>

1. *Name calling device* (memberi gelar buruk)
2. *Gelittering generlaties device* (menyebut kata penghubung indah yang digemari orang orang)
3. *Transfer device* (mempertautkan satu perkara yang digemari dengan sesuatu yang disukai orang banyak)
4. *Testimonial device* (memakai ucapan orang terkenal)
5. *Plainfolks device* (bergerak sebagai rakyat banyak, atau menggunakan semboyan rakyat)
6. *Card stacking device* (pemutarbalikan persoalan)

<sup>39</sup> Dan Nimmo, *op.c it*, hal. 125

<sup>40</sup> Zulkarimein Nasution, *op. cit*, hal. 106

<sup>41</sup> A.H. Hasanuddin, *Rhetorika Dakwah dan Publisistik dalam Kepemimpinan*, [Surabaya: Usaha Nasional, 1982], hal. 20

7. *Band wagon device* (mempergunakan alat-alat pemikat atau penarik)

c. Periklanan Politik

Periklanan politik adalah pengiklanan citra (imej), daya tarik yang diarahkan untuk membangun sebuah reputasi. Periklanan politik adalah sebagai periklanan massa yaitu sebagai komunikasi dari suatu pihak kepada orang banyak. Periklanan politik mempunyai orientasi; sasarannya bukan individu dalam suatu kelompok melainkan pribadi yang independen terlepas dari kelompok dan tujuannya untuk menarik perhatian orang agar bertindak dan memilih sendiri.

d. Rhetorika

Rethorika adalah komunikasi dua arah antara seseorang komunikator dengan orang lain dalam arti dua orang atau lebih. **Richard E. Young, Alton L. Becker** dan **K.L. Pike** seperti dikutip A.H. Hasanuddin dalam bukunya "*Rhetoric Discovery and Change*" mendefinisikan rhetorika sebagai ilmu yang mengajarkan kita menggarap masalah wicara, tutur kata secara heiristik-epistimologis, untuk membina saling pengertian dan kerja sama.<sup>42</sup>

Rhetorika dapat terjadi antara seorang komunikator dengan komunikan. Masing-masing berusaha untuk saling

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 14



mempengaruhi pandangan yang lain melalui tindakan-tindakan yang resiprokal dan timbal balik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologis, yaitu mempelajari tentang prosedur (metodologi) yang digunakan oleh (seseorang [etnik], lembaga, masyarakat, dll), dalam upayanya untuk menangani dunia dengan cara yang bermakna.<sup>43</sup>

Jadi fokus dalam penelitian ini adalah mempelajari tentang prosedur atau metode yang digunakan pengurus DPD PKS Kota Salatiga dalam membangun opini publik dan membuat pesan politik. Atau dengan kata lain, penelitian ini menfokuskan diri pada pendiskripsian dan analisa terhadap model atau pola komunikasi politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga dalam usahanya mencapai tujuan dan target politis pada pemilu legislatif 2004.<sup>44</sup>

### 2. *Objek Penelitian*

Yang dijadikan objek penelitian ini adalah setiap aktivitas komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga untuk mencapai target politis pada pemilu 2004 yang meliputi unsur-unsur

<sup>43</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek*, alih bahasa Tjun Surjaman, Bandung : Remaja Rosdakarya cet. III, 2001, hal. 242.

<sup>44</sup> Kalau mengacu pendapat Drs. Mardalis, penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

komunikasi politik dan model-model atau pola komunikasi yang dapat ditunjukkan dengan berbagai program dan kegiatan partai.

Pemilihan obyek penelitian ini, selain karena merupakan otoritas penulis untuk memilih dan menentukan obyek dan lokasi penelitian, juga karena didasari oleh keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dana ataupun waktu.

### **3. *Sumber Data***

Sumber data penelitian ini adalah pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga, pengurus DPC Partai Keadilan Sejahtera se-kota Salatiga, anggota Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga, serta dokumen tertulis yang dapat dijadikan informasi dan bahan dalam proses pengumpulan data.

### **4. *Metode Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a) *Interview***

Metode ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum program-program PKS Kota Salatiga sebagai bentuk komunikasi politik untuk mencapai target politik pada pemilu 2004. Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, sebab dalam melaksanakan interview bebas bertanya dengan membawa

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Jenis interview ini mudah dilakukan, karena seorang interviewer bebas mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab dengan bebas dan terbuka. Dalam melakukan interview ini, penulis menggunakan alat bantu berupa *interview guide* yang berfungsi sebagai penentu arah jalannya wawancara.

b) Metode Dokumentasi

Status metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai pelengkap, yaitu untuk mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh melalui interview maupun observasi. Data yang dikumpulkan dengan metode ini adalah gambaran umum PKS Kota Salatiga sebagai unit penelitian, dan data tentang hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan politik menjelang dan pada saat pemilu 2004.

### 5. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep terpenting dalam sebuah penelitian yang akan menentukan validitas data yang diperoleh. Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan dengan menggunakan berbagai kriteria. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam menentukan keabsahan sebuah data, ada 9 teknik yang dapat dipergunakan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi,

pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik dengan memanfaatkan data lain sebagai pembanding.<sup>45</sup>

Sebagai data pembanding penulis menampilkan beberapa pendapat masyarakat Salatiga dari berbagai lapisan, antara lain; politisi, akademisi, pengusaha, mubaligh/kiai, dan fungsionaris partai lain.

Data yang diperoleh dari pendapat pihak diluar PKS dicocokkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara dari pihak internal PKS Kota Salatiga, dan dengan data yang diperoleh dari isi dokumen yang berkaitan.

## 6. *Metode Analisa Data*

Setelah data terkumpul dengan menggunakan teknik tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data. Untuk menganalisis data-data dalam studi ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis dengan argumentasi logika yang diuraikan secara verbal. Hal ini untuk melihat kesesuaian antara teori yang disajikan dengan

---

<sup>45</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Putra, 2001, hal. 178

hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian serta menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Anas Sudijono, *Diktat Kuliah Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, Jogjakarta: U.D. Rama, 1981, hal. 23



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **BAB IV.**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data dan penjelasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa, pola komunikasi politik yang dibangun PKS Kota Salatiga pada pemilu legislatif tahun 2004, menfokuskan pada pembangunan citra partai, bukan figur yang dicalonkan menjadi anggota legislatif. Hal ini terlihat dari hasil pemilu legislatif yang dihelat pada tanggal 5 April 2004, yang menunjukkan bahwa konstituen PKS Kota Salatiga yang mencoblos gambar partai tampak lebih banyak dibanding dengan yang mencoblos tanda gambar dan nama calon. Akan tetapi pola ini memiliki nilai positif, yaitu konflik internal partai bisa dihindari, sehingga soliditas dan kelestarian partai tetap terjaga. Dapat dibayang apa jadinya partai ini di masa datang, kalau terjadi perpecahan. Sudah kecil pecah lagi.

Adapun Komunikator Politik PKS Kota Salatiga pada pemilu legislatif 2004 terbagi dalam dua kelompok, yaitu politikus sebagai komunikator politik dan aktivis sebagai komunikator politik. Belum adanya kelompok profesional sebagai komunikator politik yang memiliki kemampuan khusus dalam mengolah simbol dan menjadi penghubung antara elit dengan khalayak umum, menjadi catatan penting bagi PKS Kota Salatiga, dan itu adalah salah satu kelemahan PKS Kota Salatiga.

Pesan Politik yang disampaikan oleh Komunikator Politik PKS Kota Salatiga didominasi oleh pesan-pesan yang bersifat verbal. Sedangkan pesan

non-verbal yang disampaikan bersifat abstrak, seperti keteladanan moral, sehingga masyarakat awam/abangan kurang tertarik dengan pesan-pesan tersebut. Mereka lebih bisa menerima, kalau pesan itu disampaikan secara fisik dan material, seperti prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Media ataupun saluran komunikasi politik yang PKS Kota Salatiga gunakan pada pemilu legislatif 2004 cukup beragam, mulai dari *komunikasi massa* yang menekankan satu-kepada-banyak, seperti sarasehan dan sambung rasa, *komunikasi interpersonal*, yang merupakan bentukan dari hubungan satu-kepada-satu, seperti kerja sel yang dilakukan oleh seluruh kader, serta *komunikasi organisasi*, seperti peringatan HUT partai dan acara-acara partai lainnya. Akan tetapi sayang saluran media massa belum digunakan secara maksimal, padahal semua orang tahu bahwa, secara nasional pers punya peranan yang sangat besar terhadap besarnya PKS. Belum adanya kader PKS Kota Salatiga yang memiliki kemampuan sebagai komunikator profesional dalam politik tentunya menjadi catatan penting bagi mereka.

Sedangkan Basis konstituen yang menjadi target PKS adalah massa partai-partai Islam, para pemilih pemula, dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Salah satu faktor keberhasilan PKS Kota Salatiga adalah tingkat militansi dan kerja keras, serta keikhlasan dalam berjuang para kader partai, yang mengfungsikan dirinya sebagai komunikator politik. Maka tidak salah kalau PKS diidentikkan sebagai partai kader, yakni sebuah partai politik yang

melakukan rekrutmen kader secara berkala dan teratur, dengan sistem pembekalan tertentu berdasarkan ideologi partai. Pengkaderan berjalan hirarkis dan berjenjang dalam mendapatkan tingkatan pembekalan ideologi.

## **B. Saran-Saran**

1. PKS Kota Salatiga perlu menampilkan dan menonjolkan caleg-caleg yang lebih berkualitas dan menjadi pionir dengan performance dari sebuah politik moral, yang ramah dan moderat, karena watak dari masyarakat Salatiga yang menjadi pemilih dalam pemilu itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan pada harmoni, ketentraman, kedamaian, juga pada keterbukaan dan keluasan sikap.
2. Untuk ke depan, PKS Kota Salatiga harus meningkatkan kemampuan SDM para kader, sehingga mampu menjadi komunikator politik yang memiliki ketrampilan dalam mengolah simbol-simbol dan memanfaatkan ketrampilan ini untuk menempa mata rantai yang menghubungkan beberapa kelompok konstituen yang beragam.
3. Perlu dipersiapkan manajemen kampanye yang baik dan efektif. Walaupun PKS dalam mengorganisasikan setiap kegiatan, seperti demonstrasi sangat baik, tetapi dalam manajemen kampanye memiliki banyak perbedaan. PKS perlu meningkatkan kemampuannya, seperti dalam penggarapan media. PKS tidak perlu malu untuk belajar, karena partai lain pun bahkan menyewa orang untuk menggarap media untuk memenangkan pemilu, yaitu tim media yang profesional dan tim fundrising yang canggih.

4. Modal 4 kursi di parlemen merupakan posisi yang sangat strategis. Penguasaan birokrasi di pemerintahan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau kemarin, kontribusi PKS dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat belum terlihat, itu mungkin karena baru punya satu wakil di parlemen. Akan tetapi sekarang keadaan sudah jauh berbeda, oleh karena itu posisi tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lebih luas, sehingga popularitas PKS Kota Salatiga ke depan akan lebih meningkat.

### **C. Kata Penutup**

Sebagai kata penutup, tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali ucapan syukur alhamdulillah, karena atas bimbingan dan pertolongannya, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis yakin bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, petunjuk dan bimbingan-Nya terhadap perjuangan PKS Kota Salatiga dan semoga dihitung sebagai amal sholih di sisi-Nya. Amin.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dengan memohon pertolongan dan petunjuk-Nya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya, dan pada diri penulis khususnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, dan Artikel

- Anshari, Endang Saefudin, *Piagam Jakarta*, (Bandung: Pustaka, 1980)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Assiba'i, Mustafa, *Sari Sejarah dan Perjuangan Rasulullah*, (Jakarta, al-Ittihad al-Islami al-'Alimi, 1985)
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, cet VII, 1982)
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan (Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indoneia)*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002)
- DPP PK, *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta th. 2002
- DPP PK (Syamsul Balda, abu Ridlo, Untung Wahono), *Politik Dakwah Partai Keadilan*, (Jakarta, DPP PK, 2000)
- Effendy, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, cet. II, 1992)
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam*, (Yogyakarta : Galang Press, 2001).
- Hasanuddin, A.H., *Rhetorika Dakwah dan Publisistik dalam Kepemimpinan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Hasan, Abdul Hasib, *Kita dan Adab Politik*, dalam Bulletin Suara Keadilan, Vol. I, No. 15
- Koirudin, *Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)
- Malik, Dedy Djameluddin dan Ibrahim, Idi Subandy, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998)
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Putra, 2001)



- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995)
- Nasution, Zulkarimein, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media (terjemah dari Political Communication and Public Opinion in America)*, penerjemah : Tjun Surjaman , (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 2000)
- \_\_\_\_\_, *Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek, (terjemah dari Political Communication and Public Opinion in America)* , alih bahasa Tjun Surjaman, (Bandung : Remaja Rosdakarya cet. III, 2001)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1996)
- Partanto, Pius dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Penerbit Arkola, 1994)
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Komunikasi Politik untuk Indonesia: Sebuah Peta Penelitian*, Makalah disampaikan pada “Seminar Nasional Komunikasi Menghadapi Tinggal-Landas”, ISKI, Semarang 21-25 Oktober 1985.
- Rogers, Evert M., *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Edwart Depari dan Calvin MacAndrews (ed.), (Yogyakarta: Gajahmada University Press, cet VII, 1998)
- Saidi, Ridwan, *Kepemimpinan Islam Indonesia Kini dan Esok*, (Jakarta : Antarkota, 1986)
- Sudijono, Anas, *Diktat Kuliah Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, (Jogjakarta: U.D. Rama, 1981)
- Suryadi, Dede, *Proses Lahir dan Kontroversi NKK/BKK 1978 – 1980*, Skripsi Sarjana FS-UI, 1999